

Proyek Jadi Investasi Alternatif

Proyek infrastruktur merupakan investasi langsung dengan tingkat pengembalian tinggi. Pemilik dana jangka panjang bisa menysasar proyek ini. Pemerintah menjembatani sekaligus menyiapkan instrumennya.

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas moneter dan pemerintah berorientasi menurunkan suku bunga secara bertahap. Tujuannya agar dana masyarakat tidak melulu diinvestasikan ke deposito, tetapi juga ke instrumen lain yang lebih memberikan dampak berganda terhadap ekonomi, salah satunya proyek infrastruktur.

Demikian salah satu pesan dalam PINA Day 2018 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, Kamis (18/1). PINA adalah Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah.

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, dalam pidato kuncinya, menyatakan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin menurunkan suku bunga. Tujuannya agar perekonomian bergerak lebih cepat.

Menurut Bambang, menyimpan dana jangka panjang di instrumen seperti deposito akan memberikan imbal hasil kecil. Hal ini tidak menguntungkan bagi peserta dana jangka panjang.

"Kalau tingkat bunga turun, bagaimana deposito bisa memberikan manfaat yang bagus untuk peserta. Selama ini, kebanyakan masih taruh uang di deposito. Akan tetapi, yang masuk ke investasi langsung sangat sedikit," katanya.

Investasi langsung yang memberikan tingkat pengembalian tinggi, menurut Bambang, terkait pembangunan infrastruktur. Potensinya besar sebab kebutuhan anggaran di luar APBN sangat besar.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp 4.769 triliun. Kemampuan APBN hanya mencapai Rp 1.969,6 triliun atau 41,3 persen. Adapun sisanya diharapkan akan dipenuhi swasta dan BUMN. Pembiayaan swasta diproyeksikan Rp 1.740,7 triliun atau 36,5 persen. Sementara

pembiayaan dari BUMN sebesar Rp 1.058,7 triliun atau 22,2 persen.

Hal yang diperlukan, menurut Bambang, adalah menjembatani pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Dalam hal ini, Bappenas membentuk skema PINA.

PINA merupakan skema pembiayaan yang tidak melibatkan APBN atau jaminan pemerintah. Konsep yang digunakan adalah menggandeng investor untuk menambah modal pemilik proyek. Dengan cara itu, pemilik proyek mampu menarik kredit yang lebih besar untuk merealisasikan investasi. Biasanya, kredit yang bisa ditarik sebesar empat kali lipat dari modal.

Mempercepat

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, skenario besarnya adalah mempercepat penyaluran dana-dana yang tersedia untuk berbagai pembiayaan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur. Caranya dengan mendorong agar suku bunga semakin murah.

"Deposito akan kita dorong murah supaya orang tergerak untuk berinvestasi. Investasi pasti instrumennya melalui pasar modal. Inilah yang sekarang akan kami kembangkan, yakni menciptakan instrumen keuangan sehingga banyak alternatif investasi, baik oleh perusahaan besar seperti dana pensiun maupun ritel. Dengan demikian, perputaran uang untuk investasi menjadi cepat," kata Wimboh.

Dalam sesi dialog dengan panelis lainnya, CEO PINA, Ekoputro Adijayanto menyatakan, penting bagi pemilik proyek untuk menyiapkan proyek dan struktur pembiayaan yang menarik. Dalam hal ini, Bappenas bersama dengan pemangku kepentingan lain siap memfasilitasi. (LAS)